

**RANGKUMAN LKPJ
BIRO HUKUM TA 2020**

1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI :

1.1 Dasar Hukum Organisasi :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- b. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung

1.2 Biro Hukum Tidak Mengelola PAD

1.3 Belanja Langsung Berupa Gaji Melekat Pada Biro Umum Setdaprov

2. VISI, MISI GUBERNUR DAN JANJI KERJA GUBERNUR

VISI “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Biro Hukum dalam melaksanakan misi dan janji kerja gubernur lampung melaksanakan Misi Ke 2 Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik. Janji Kerja Gubernur Lampung Ke 32 Mereformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan

3. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang hukum di sekretariat daerah	Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasikan	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah sengketa hukum yang difasilitasi	100	100	100	100	100

4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Pada Tahun 2020 Biro Hukum Mendapat Pagu Anggaran murni sebesar **Rp. 3.100.000.000.-** dan setelah Refocusing untuk penanganan covid 19 pada Perubahan APBD mengalami pengurangan sebesar **Rp. 1.665.436.600,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.630.997.153,-** Sisa anggaran sebesar **Rp. 34.439.447.-** (telah di kembalikan ke kas daerah) dalam presentase serapan dana APBD mencapai **97.43%**, anggaran tersebut di atas rincian sebagai berikut :

Pagu Anggaran murni sebesar	Rp. 3.100.000.000.-
Anggaran Kena Recofusing	Rp. 1.434.563.400.- (46.27%)
Perubahan APBD	Rp. 1.665.436.600,-
Realisasi Anggaran	Rp. 1.630.997.153,-
	<hr/>
Sisa Anggaran	Rp. 34.439.447.-

Anggaran tersebut terbagi dalam 2 program dan 11 kegiatan dengan rincian sebaga berikut :

N o	Nama Program / Kegiatan	Indikator kinerja	APBD Murni TA. 2020 (Rp)	Perubahan APBD TA. 2020 (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Jumlah dana recofusing	%
A.	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum							
1	Harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5 perda	450.000.000. -	379.500.000. -	374.182.5 00.-	98.60%	70.500.000.-	16%
2	Harmonisasi penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur	500 Dokumen	150.000.000. -	73.794.700.-	71.090.30 0.-	96.34%	76.205.3000.-	50.80%
3	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (JDIH)	15 Kab/Kota	300.000.000. -	132.725.000. -	127.332.9 00.-	95.94%	167.275.000.-	55.75%
4	Evaluasi Produk Hukum Kab/kota	15 Kab/Kota	200.000.000. -	108.605.400. -	108.592.8 00.	99.99%	91.394.600.-	45.69%
5	Penyuluhan Hukum dan Pelaksanaan Aksi HAM	15 Kab/Kota	300.000.000. -	162.729.500. -	162.549.4 00.-	99.89%	137.270.500.-	45.75%
6	Pembinaan dan Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota	15 Kab/Kota	150.000.000. -	71.538.000.-	66.268.40 0.-	92..63%	78.462.000.-	52.30%
7	Penyelesaian Sengketa Hukum di pengadilan (Litigasi) se provinsi Lampung	12 Perkara	750.000.000. -	322.706.500. -	322.024.4 00.-	99.79%	427.293.500	56.97%

N o	Nama Program / Kegiatan	Indikator kinerja	APBD Murni TA 2020 (Rp)	Perubahan APBD TA 2020 (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)	Persen tasi (%)	Jumlah dana recofusing	%
8	Penyelesaian Sengketa Hukum di Luar pengadilan (Non Litigasi)	15 Kab/Kota	150.000.000.-	23.632.000.-	23.482.000.-	99.37%	126.308.000.-	84.20%
9	Fasilitasi Produk Hukum Kab/kota	15 Kab/Kota	300.000.000.-	174.000.000.-	161.711.187.-	92.94%	126.000.000.-	42%
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							
10	Rapat-Rapat Koordinasi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	10	70.000.000.-	0	0	0	70.000.000.-	100%
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, evaluasi dan capaian keuangan biro hukum setda provinsi lampung	20 Dokumen	280.000.000.-	216.205.500.-	213.763.266.-	98.87%	63.794.500.-	22.78%
	T O T A L		3.100.000.000.-	1.665.436.600,-	1.630.997.153,-	97.43%	1.434.563.400.-	46.27%

5. REALISASI TARGET KINERJA DARI PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN PADA BIRO HUKUM TAHUN 2020

5.1 Bagian Peruruan Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1.	PERDA	5 (Terlampir)
2.	PERGUB	69
3.	KEPGUB	612
4.	MoU	20

5.2 Bagian Kebijakan Daerah Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah
1	Evaluasi Raperda 15 Kab/ Kota	28 Raperda (Terlampir)
2	Fasilitasi Perda, Raperbup, RaperDPRD (15 Kab/Kota)	67 Raperda, 138 Raperbup, 10 RaperDPRD
3	No Register Raperda 15 kab/kota	140No Reg

5.3 Bagian Bantuan Hukum Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Litigasi	14 Perkara (Terlampir)
2	Non Litigasi dan Pembinaan HAM	3 Perkara Mediasi/ Non Litigasi 11 Pembinaan HAM
3	Tata Usaha	20 Dokumen

KEPALA BIRO HUKUM



PUADI JAILANI,SH.MH.

Pembina Tingkat 1

NIP.196509051991031004

LAPORAN BAGIAN BANKUM TAHUN 2020

1. LITIGASI

PERKARA YANG DITANGANI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

NO	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK GUGATAN	TEMPAT	KETERANGAN
1	Mardiansyah	Gubernur Lampung	Lelang Tender (PMH)	PN.Tanjungkarang	Mediasi
2	Edi Surahman	Gubernur Lampung	Pengadaan Tanah Way Hui Kota Baru	PN Tanjungkarang	Mediasi
3	Mahyudin	Gubernur Lampung	Pengadaan tanah Desa Sinar Ogan Tanjung Bintang	PN Kalianda	Pembacaan Gugatan
4	Suradi	Gubernur Lampung	Gugatan Tanah Tol Kalianda	PN Kalianda	Pembacaan Gugatan
5	Al Rifki	Gubernur Lampung	Perbuatan Melawan Hukum	PN.Tanjungkarang	Bukti Saksi
6	Malik Dkk..	Gubernur Lampung	Jl. Tol Kalianda	PN. Kalianda	Banding
7	Desyanti,SE.	Gubernur Lampung	Surat Keputusan Gubernur	PTUN BL	Kasasi
8	Hendrik Lianto Dkk.	Gubernur Lampung	Surat Keputusan Gubernur	PTUN-BL	Menang (Penggugat Banding)
9	Suradi Dkk.	Gubernur Lampung	Jl. Tol Kalianda	PN Kalianda	Menang (Penggugat Banding)
10	Abdul Hamid	Gubernur Lampung	Sengketa Tanah Sukarame	Mahkamah Agung	Peninjauan Kembali
11	Sunaryo	Gubernur Lampung	Jl. Tol Tulang Bawang Barat	Mahkamah Agung	Kasasi Menang (Inkracht)
12	Desyanti, SE.	Gubernur Lampung	Surat Keputusan Gubernur	PTUN-BL	Menang (Gugatan Dicabut)
13	Sudrajat	Gubernur Lampung	Jl. Tol Kalianda	PN.Kalianda	Menang (Penggugat Bandung)
14	Van Royen Girsang, SH. MH.	Gubernur Lampung	Sengketa Tanah Korpri	PN. Tj. Karang	Menang (Penggugat Banding)

2. NON LITIGASI DAN PEMBINAAN HAM 2020

Perkara Mediasi/Non litigas yang Ditangani Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Uraian mediasi / Non Litigasi	wilayah
1	Sengketa Tanah antara Masyarakat adat dan Pemerintah Daerah	Lamsel
2	Sengketa Lahan Register 38	Mesuji
3	Sengketa Kepemilikan Lahan Keluarga Besar Ryamizar Ryacudu	Way Kanan

Pembinaan HAM Tahun 2020

No	Kab/ Kota yg di Laksanakan Pembinaan HAM
1	Lampung Utara
2	Metro
3	Peringsewu
4	Way Kanan
5	Lampung Tengah
6	Mesuji
7	Lampung Seltan
8	Pesisir Barat
9	Tulang Bawang
10	Tulang Bawang Barat
11	Lampung Barat

3. SUB TATA USAHA TAHUN 2020

Dokumen Kegiatan TU

NO	Uraian	Keterangan Dokumen
1	SAKIP (11 Dokumen)	LKJ, IKU, Rencana Kerja, Rencana Aksi, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja , POKIN, CASCADING, IKI Staf, Perjanjian Kinerja Perubahan (11 Dokumen)
2	PNRB	1 Dokumen
3	LPPD	1 Dokumen
4	Agen Perubahan	1 Dokumen
5	Evaluasi Renja	4 Dokumen
6	SOP Kegiatan	1 Dokumen
7	Kepegawaian	Anjab, ABK (2 dokumen)
8	Barang	2 Dokumen
9	Keuangan	12 Dokumen

LAPORAN BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Uraian	Jumlah
1.	PERDA	5
2.	PERGUB	69
3.	KEPGUB	612
4.	MoU	20

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2020

NO	NO/TGL PERATURAN	TENTANG	NO REGISTRASI	KET
1	1 TAHUN 2020 1 SEPTEMBER 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019	LD NO 1 TLD NO. 505 REG NO (1-106/2020)	BPKAD
2	2 TAHUN 2020 27 OKTOBER 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020	LD NO 1 TLD NO. 506 REG NO (2-161/2020)	
3	3 TAHUN 2020 23 DESEMBER 2020	Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	LD NO 1 TLD NO. 507 REG NO (3-187/2020)	
4	4 TAHUN 2020 29 DESEMBER 2020	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif	LD NO 1 TLD NO. 508 REG NO (4-194/2020)	
5	5 TAHUN 2020 29 DESEMBER 2020	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021	LD NO 1 TLD NO. 509 REG NO (5-203/2020)	

LAPORAN BAGIAN KEBIJAKAN

1. JUMLAH EVALUASI RAPERDA TAHUN 2020

NO	KAB/ KOTA	Rape rda
1	TANGGAMUS	2
2	PERINGSEWU	1
3	PESIBAR	4
4	METRO	1
5	LAMPUNG TIMUR	1
6	TULANG BAWANG BARAT	1
7	TULANG BAWANG	3
8	PESAWARAN	1
9	LAMPUNG BARAT	3
10	LAMPUNG TENGAH	2
11	MESUJI	1
12	WAY KANAN	1

13	BANDAR LAMPUNG	2
14	LAMPUNG SELATAN	5
15	LAMPUNG UTARA	-
JUMLAH		28

2. JUMLAH FASILITASI RAPERDA, RAPERBUP, RAPERDA TAHUN 2020

NO	KAB/ KOTA	Raperda	Raperbup/ Raperwali	Raper DPRD
1	TANGGAMUS	2	37	-
2	PERINGSEWU	17	37	2
3	PESIBAR	8	2	1
4	METRO	3	2	-
5	LAMPUNG TIMUR	-	10	1
6	TULANG BAWANG BARAT	-	2	-
7	TULANG BAWANG	11	4	4
8	PESAWARAN	-	1	-
9	LAMPUNG BARAT	1	1	-
10	LAMPUNG TENGAH	8	1	
11	MESUJI	-	2	1
12	WAY KANAN	3	37	1
13	BANDAR LAMPUNG	8	1	-
14	LAMPUNG SELATAN	6	1	-
15	LAMPUNG UTARA	-	-	-
Jumlah		67	138	10

3 JUMLAH RAPERDA YANG TELAH DI BERI NO REGISTRASI

NO	KAB/ KOTA	RAPERDA
1	TANGGAMUS	9
2	PERINGSEWU	7
3	PESIBAR	10
4	METRO	10
5	LAMPUNG TIMUR	9
6	TULANG BAWANG BARAT	10
7	TULANG BAWANG	12
8	PESAWARAN	7
9	LAMPUNG BARAT	7
10	LAMPUNG TENGAH	11
11	MESUJI	8
12	WAY KANAN	10
13	BANDAR LAMPUNG	9
14	LAMPUNG SELATAN	16
15	LAMPUNG UTARA	5
Jumlah		140

